

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN TRADISIONAL MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH

Muhammad Daffa Alfatah

NPP 29.0467

*Asdaf Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: daffa.df819@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The National Marine and Fisheries Independent Community Empowerment Program hereinafter referred to as PNPM Mandiri KP is a community empowerment program that aims to increase skills and income, increase marine and fisheries entrepreneurial spirit and improve the welfare of coastal communities. Central Bangka Regency is one of the 120 regencies in Indonesia. Purpose:* This study aims to determine how empowerment through PNPM Mandiri KP by the Department of Fisheries in Koba District, Central Bangka Regency. Then to find out the impact of empowerment through PNPM Mandiri-KP on the welfare of fishermen who are beneficiaries of PNPM Mandiri-KP in Koba District, Central Bangka Regency. **Methods:** This research was conducted using a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The basic research method in data collection techniques is through observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** Based on the results of research conducted that the implementation of fishermen empowerment through PNPM Mandiri KP by the Fisheries Service has been carried out but some have been optimal or not yet optimal, the success of this program of activities of the Fisheries Service can be seen from the increase in marketing and production which the Fisheries Service provides facilities to fishermen from the program of activities. In addition, in maintaining the physical environment the Fisheries Service of Central Bangka Regency is also going well with the Coral Reforestation and the construction of artificial habitats (Clumps). **Conclusion:** Traditional fishermen empowerment activities through PNPM Mandiri KP are considered good in terms of increasing community knowledge, training, increasing production, marketing, environmental sustainability and strengthening institutions, however, capital activities are considered not optimal, such as increasing capital because there is no longer a budget in the form of Direct Assistance. Society (BLM). So the Central Bangka District Office chose to act as an intermediary between the bank and small fishermen. However, small fishing communities still do not dare to deal with banks, so they prefer to borrow funds from middlemen. For this reason, the authors suggest to the Fisheries Service of Bangka Regency to improve guidance and counseling in terms of increasing the activity program to increase the capacity of fishermen in GPS or SIDOLPHIN operation, marketing, capital and production. for fishermen in Koba District, Central Bangka Regency.

Keywords: *Empowerment of Fishermen, Traditional Fishermen, PNPM Mandiri KP, Central Bangka Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan *skill* dan penghasilan, peningkatan jiwa wirausaha kelautan dan perikanan dan meingkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu dari 120 Kabupaten yang ada di Indonesia. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan melalui PNPM Mandiri KP oleh Dinas Perikanan di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian untuk mengetahui dampak pemberdayaan melalui PNPM Mandiri-KP terhadap kesejahteraan nelayan penerima manfaat PNPM Mandiri-KP di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. **Metode:** Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, Metode peneliti yang mendasar dalam teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan pemberdayaan nelayan melalui PNPM Mandiri KP oleh Dinas Perikanan telah dilaksanakan namun ada yang sudah optimal maupun belum optimal, keberhasilan dari program kegiatan Dinas Perikanan ini dapat dilihat dari peningkatan pemasaran serta produksi yang mana Dinas Perikanan memberikan fasilitas kepada nelayan dari program kegiatan tersebut. Selain itu dalam menjaga lingkungan fisik Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah juga berjalan dengan baik dengan adanya Reboisasi Karang dan pembangunan habitat buatan (Rumpun). **Kesimpulan:** Kegiatan pemberdayaan nelayan tradisional melalui PNPM Mandiri KP dinilai baik dalam segi peningkatan pengetahuan masyarakat, pelatihan, peningkatan hasil produksi, pemasaran, kelestarian lingkungan dan penguatan Lembaga, namun adapun kegiatan pemodalannya dinilai belum optimal seperti peningkatan modal dikarenakan tidak adanya lagi anggaran berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Sehingga Dinas Kabupaten Bangka Tengah memilih untuk menjadi perantara antara bank dan nelayan kecil. Namun masyarakat nelayan kecil masih belum berani berurusan dengan bank sehingga lebih memilih meminjam dana dari tengkulak. Untuk itu penulis menyarankan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka untuk ditingkatkan pembinaan dan penyuluhan dalam hal meningkatkan program kegiatan peningkatan kemampuan nelayan dalam pengoperasian GPS atau SIDOLPHIN, pemasaran, pemodalannya dan produksi. bagi nelayan di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Kata kunci: Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Tradisional, PNPM Mandiri KP, Kabupaten Bangka Tengah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar nomor satu di dunia yang memiliki luas laut dan jumlah pulau dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km (KKP RI, 2019). Total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta km² yang terdiri atas 3,257 juta km² (perairan pedalaman, kepulauan dan laut teritorial) dan 2,936 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen serta terdiri dari 17.504 pulau (BIG, 2016) maka posisi dan letak Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyediaan bahan baku bagi masyarakat nasional dan

internasional (Apridar, 2011: 21). Secara demografis, wilayah pesisir dihuni kurang lebih 110 juta jiwa atau 60 persen dari penduduk Indonesia yang menghuni dalam radius 50 km dari garis pantai (Suhana dkk., 2010:33-34). Saat ini terdapat 12.857 desa pesisir yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (KKP, 2020). Daerah pesisir atau pantai pada umumnya dihuni oleh masyarakat nelayan tradisional yang selalu dihubungkan dengan kehidupan serba terbatas dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Keadaan ini sangat ironis karena mereka berada pada lingkungan pesisir dan perairan yang sangat kaya akan potensi sumberdaya ikan (Widhiarto, 2004:4). Menurut Nikijulw (2001) dalam Suhana dkk. (2010:35), kemiskinan di masyarakat pesisir tidak lepas dari kehidupan mereka yang bersifat sederhana atau dibawah rata-rata, menjalani usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya hanya untuk menghidupi keluarga sendiri dengan skala yang kecil sehingga pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan periode yang pendek

Kabupaten Bangka Tengah adalah salah satu kabupaten yang berkontribusi dalam peningkatan perekonomian yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di sektor perikanan. Pada tahun 2019 jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap melalui kerangka survey. Realisasi produksi perikanan tahun 2019 yaitu sebanyak 25.068,90 ton, produksi tersebut melebihi target yang ditetapkan hingga akhir tahun 2016 sebesar 19.795,70 ton atau pencapaiannya sebesar 126,63 persen. Produksi perikanan tangkap ini terdiri dari produksi perikanan tangkap diperairan laut dan budidaya. Kecamatan Koba terletak di Kabupaten Bangka Tengah merupakan kecamatan dengan Jumlah rumah tangga perikanan tangkap tertinggi (DKP Kabupaten Bangka Tengah, 2016), sebanyak 582 Kepala Keluarga. Namun kebanyakan nelayan di kecamatan ini merupakan nelayan kecil, Kecamatan ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri-KP Kabupaten Bangka Tengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dimulai pada tahun 2009 oleh Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mendukung prioritas nasional yaitu penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari program ini tidak lepas dari peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kesempatan kerja untuk masyarakat pesisir yang miskin. Sasaran PNPM Mandiri KP yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ataupun tidak dipesisir tetapi memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. (DKP, 2009).

Pelaksanaan PNPM Mandiri-KP tahun pada 2009 dilaksanakan di 120 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Bangka Tengah merupakan kabupaten penerima alokasi dana kegiatan PNPM Mandiri-KP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor SK.36/KP3K/XI/2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) Tahun Anggaran 2009 dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2014.

PNPM Mandiri-KP diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terbukti dari tabel 1.1 yang menunjukkan data produksi perikanan tangkap yang tiap tahunnya meningkat, tetapi jumlah rumah tangga perikanan budidaya dan rumah tangga perikanan laut mengalami penurunan padahal PNPM Mandiri-KP masih dilaksanakan dan belum ada kajian mengenai masalah tersebut dan bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Kabupaten Bangka Tengah terkhususnya di Kecamatan Koba. Kecamatan Koba memiliki sumber daya alam dengan potensi yang sangat baik dalam kelautan dan perikanan ditambah PNPM Mandiri-KP yang dapat meningkatkan pendapatan, kemandirian dan kesejahteraan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu masyarakat pesisir, namun pada kenyataannya banyak nelayan yang meninggalkan potensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya alam tersebut, adanya persilangan kepentingan, kurangnya dana, fasilitas, serta pemasaran yang kurang maksimal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan masyarakat nelayan di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah terkait pemberdayaan masyarakat nelayan. Yang pertama yaitu pengetahuan nelayan dalam mengelola modal masih rendah. Dimana pemikiran nelayan yang masih konsumtif. Masyarakat nelayan kecil masih memikirkan setelah berlabuh dan mendapatkan penghasilan, nanti pasti akan mendapat tangkapan lagi ketika melaut. Sehingga ketika musim panceklik banyak nelayan yang kebingungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun pemodal usaha. Kedua Masyarakat Nelayan kecil yang didominasi SDM yang rendah sangat membutuhkan pelatihan dalam pengoperasian GPS dalam kegiatan melaut. Ketiga Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri KP Dinas Perikanan memfasilitasi permodalan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) masyarakat nelayan Tahun 2016 untuk tahun berikutnya Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tidak memfasilitasi lagi dikarenakan revisi anggaran dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan melalui PNPM Mandiri-KP untuk modal bagi masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Keempat kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan, maupun ada nelayan yang nakal dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom, bus dan pukat berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem laut, terutama pada terumbu karang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah terkait hal ini menjalankan sebuah perencanaan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat terkhusus terhadap masyarakat nelayan di Kabupaten Bangka Tengah. PNPM Mandiri KP dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ditujukan khusus untuk membantu dalam perkembangan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan demi mencapai kesejahteraan. Program PNPM Mandiri KP memiliki tujuan meningkatkan aktivitas usaha dalam bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan masyarakat dengan pengoptimalan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam memanfaatkan sumber daya laut dan perikanan terpadu.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai latar belakang diatas maka masalah-masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pengetahuan nelayan tentang pengelolaan keuangan atau modal
2. Masih rendahnya pengetahuan nelayan dalam menggunakan teknologi GPS
3. Terhentinya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam pemodalan nelayan tradisional
4. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap terlarang

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Khairul Azmi pada tahun 2021 melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat nelayan mengenai PNPM Mandiri KP di wilayah pesisir pantai Aceh dengan lokasi penelitian Kota Banda Aceh, Desa Alue Naga, dimana permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan pendapatan oleh masyarakat nelayan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri KP. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa selain terbantu secara ekonomi, nelayan juga merasakan manfaat dari ilmu dibidang penangkapan dan kelautan serta terjadi penyerapan tenaga kerja lebih banyak.

Pada 2013, Eko Pebrianata melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi PNPM mandiri KP dalam Upaya Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUPM) Budidaya Perikanan di Kabupaten Lahat, dimana permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan kebijakan belum terimplementasi dengan maksimal yang disebabkan oleh masih ada masalah pada integritas dari pelaksana dan kelompok sasaran atau banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nilai berbanding terbalik dengan

hasil tangkapan lautnya dan juga disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia serta produktivitas hasil tangkapan laut. dalam penelitian ini, penentuan lokasi secara sengaja/*purposive* dan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif dimana data primer didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan juga angket. Hasil penelitian dari Pelaksanaan kebijakan belum terimplementasi dengan maksimal, masih ada masalah pada integritas dari pelaksana dan kelompok sasaran. Rutinitas dan kinerja dinilai belum terlaksana dengan baik serta dampak yang diinginkan belum tercapai sepenuhnya

Tahun 2011, Aliza Basrah Lubis, melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pelaksanaan PNPM Mandiri KP, Modal dan Jumlah Tanggungan untuk mengetahui keadaan ekonomi serta kesejahteraan nelayan di Kota Sibolga. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa Bantuan dana dan modal memberikan pengaruh positif tetapi jumlah tanggungan keluarga memberikan pengaruh negative dan menimbulkan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan tentang meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan lebih difokuskan kepada dampak dari program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Pengukuran indikator dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari Mardikanto dan Soebianto (2017:113) mengenai pemberdayaan melalui empat upaya yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Lembaga.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara langsung mengenai dampak program PNPM Mandiri KP meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri KP.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna dari pengalaman dan penerapan Program PNPM Mandiri KP. Sedangkan pendekatan induktif dimaksudkan sebagai pendekatan yang menggali pengalaman kemudian membangun konstruksi ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman subjek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data kualitatif, wawancara dilakukan oleh penulis terhadap 22 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Kepala Bidang Pengelolaan TPI Dan Bina Usaha Hasil Perikanan, Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Perlindungan Nelayan Kecil, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Dan Kemitraan Usaha Nelayan Kecil , Kepala Seksi Pengelolaan TPI, Kepala Seksi Bina Usaha Hasil Perikanan, Camat Koba, dan 10 Masyarakat Nelayan penerima program PNPM Mandiri KP. Adapun dalam analisis data dimana

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan tahapan Reduksi data, Penyajian data, dan kemudian kesimpulan. Teori dalam analisis yang digunakan yaitu menurut Mardikanto dan Soebianto (2017:113) mengenai pemberdayaan melalui empat upaya yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Lembaga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menggunakan pendapat menurut Mardikanto dan Soebianto (2017:113) mengenai pemberdayaan melalui empat upaya yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Lembaga. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Bina Manusia

3.1.1 Peningkatan Pengetahuan Nelayan

Ketergantungan nelayan akan laut yang menjadi satu satunya mata pencarian, menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat masih berada dibawah garis kemiskinan, khususnya di Kecamatan Koba. Tingginya kebutuhan hidup tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat dari hasil melaut. Pendapatan dari hasil melaut jauh menurun dari apa yang didapat nelayan selama ini. Dengan kata lain pengetahuan nelayan dalam mengelola modal di Kecamatan Koba masih rendah. Dengan dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan nelayan. Berikut tabel Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Koba:

Tabel 1

Daftar Kelompok Usaha Bersama (KUB) Di Kecamatan Koba

No	Nama Kelompok	Alamat	Nomor SK Pembentukan
1	KUB Bintang Timur	Kelurahan Koba	188.4/70/19.04.06.03/2016
2.	Arung Samudra I	Kelurahan Arung Dalam	188.45/06/19.04.01.1002/IV/2013
3.	Sumber Rezeki	Kelurahan Padang Mulia	188.4/29/19.04.01.1004/2015
4.	Kub.Tunker	Kelurahan Arung Dalam	188.45/024/1904032009/2014
5.	Mina Lestari	Desa Kurau Barat	02/KN.ML/2016
6.	Nelayan Karang Jahe	Kelurahan Padang Mulia	001/KNBL/19.04.05.2007/2015
7.	Usaha Bersama Berkah	Kelurahan Koba	188.45/18/19.04.06.2008/2015
8.	Kub'kepiting Jaya	Desa Kurau Barat	006/SK/19.04.05.2006/2015
9.	Kub Kuda Laut	Desa Kurau	002/SK/KR/2014
10.	Kub Ombak Laut	Desa Penyak	100/023.Sk/19.04.01.07/2015
11.	Kub Sinar Laut	Desa Penyak	100/022.SK/19.04.01.07/2015
12.	Citra Lestari	Desa Kurau	188.45/041/19.04.06.08/2015
13.	Patin Laut	Desa Kurau	005/19.04.05.2006/2015
14.	Kub Kusuma Bahari	Desa Kurau	140/08/19.04.01.2005/IX/2012
15.	Nelayan Bersatu Guntung	Desa Guntung.	188.4/33.1/19.04.01.2006/2016
16.	Kub Nelayan Maju	Kelurahan Koba	140/28/19.04.01.1001/2013
17.	Arung Samudra Ii	Kelurahan Arung Dalam	188.4/044/19.04.01.1002/2017
18.	Kub Samudra Jaya	Kelurahan Koba	188.45/53/19.04.01.1001/2017
19.	Kub Pesisir Laut	Desa Terentang	188/62A/19.04.01.2008/2017
20.	Kub Pari Halai	Desa Kurau Barat	141/42/19.04.01.2010/2008
21.	Kub Kepiting Laut	Desa Kurau	141/86/19.04.01.2005/2018
22.	Jembatan Berok	Kelurahan Berok	188.4/45/19.04.01.1003/2019
23.	Kub Armada Karang	Desa Guntung	188/16.A/19.04.01.2006/2018
24.	Kub Harapan Makmur	Desa Penyak	141/56.SK/19.04.01.07/2019

No	Nama Kelompok	Alamat	Nomor SK Pembentukan
25	Kub Putra Laut	Desa Penyak	188.4/10/SK.KUB/2018
26.	Teri Nasi	Desa Kurau Barat	88/58/ 19.040/2010/2019
27.	Kub Surya Perkasa	Arung Dalam	199.45/054/19.04.01.1002/2020
28.	Mulia Lestari	Desa Penya Kec.Koba	141/083.SK/19.04.01.2007/2020
29.	Kub Bonsai	Desa Terentang	188/94/19.04.01.2008/2020
30.	Laut Lestari	Desa Terentang	188/98/19.04.01.2008/2020
31.	Kub Kuala Bakau Koba	Kelurahan Berok	188.4/28.2/19.04.06.2003/2018

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah 2022

Peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sendiri untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan faktor peningkatan pengetahuan adalah dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Selain untuk mempermudah akses permodalan, KUB berfungsi sebagai wadah untuk bekerjasama dan pelatihan pengembangan SDM bagi nelayan kecil. Dalam Pelaksanaannya Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memfasilitasi nelayan dengan Pelatihan Pengembangan SDM Bagi Koperasi Perikanan. Namun sampai sekarang masih ada kendala dalam SDM itu sendiri, dimana pemikiran nelayan yang masih konsumtif. Masyarakat nelayan kecil masih memikirkan setelah berlabuh dan mendapatkan penghasilan, nanti pasti akan mendapat tangkapan lagi ketika melaut. Sehingga ketika musim panceklik banyak nelayan yang kebingungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun pemodalannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam peningkatan pengetahuan bagi nelayan di Kecamatan Koba, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah merupakan tenaga pendidik dalam peningkatan SDM nelayan kecil dengan cara mengedukasi manajemen keuangan sehingga masyarakat nelayan kecil dapat bertahan ketika musim panceklik tiba. Walaupun ada kendala dalam pelaksanaannya, kendala tersebut merupakan masalah dari masyarakat atau SDM itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan demi meningkatkan pengetahuan dalam mengelola keuangan, selain itu memberikan sosialisasi membantu hasil produksi tangkapan nelayan, kapan waktu yang tepat untuk melaut, alat-alat tangkap yang canggih untuk menangkap ikan dengan tepat. Dari kegiatan peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan sudah berjalan dengan peraturan dan teori yang penulis terapkan dalam penelitian ini.

3.1.2 Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan skill nelayan. Masyarakat Nelayan kecil yang didominasi SDM yang rendah sangat membutuhkan pelatihan dalam pengoperasian GPS dalam kegiatan melaut.

Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memiliki inovasi berupa aplikasi SIDOLPHIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan) yang merupakan suatu proses penentuan wilayah potensial penangkapan/Daerah potensial penangkapan ikan melalui penginderaan jarak jauh (Inderaja) dengan menganalisis data parameter Suhu permukaan laut dan Klorofil yg hasilnya berupa peta dengan koordinat yg dapat langsung di tuju oleh para nelayan kecil yg ada disekitaran perairan Kabupaten Bangka Tengah. SIDOLPIN dikembangkan dengan menggunakan aplikasi berbasis android dan akan ditampilkan melalui running text yg ada di seluruh sentra2 nelayan. Sehingga nelayan akan mudah dalam mengakses informasi sebelum melakukan kegiatan penangkapan. Berikut gambar peta persebaran koordinat terumbu karang yang dalam aplikasi SIDOLPHIN:



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

Gambar 1 Peta SIDOLPHIN

Peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sendiri untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan faktor pelatihan penggunaan GPS dan aplikasi SIDOLPHIN agar nelayan tidak gaptek. Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memberikan pelatihan penggunaan GPS dan SIDOLPHIN sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam meningkatkan hasil tangkapannya jika masyarakat nelayan menguasai informasi yang dipetakan melalui GPS dan SIDOLPHIN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengamati pelatihan bagi nelayan yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah melakukan pelatihan bagi masyarakat nelayan kecil dalam pemanfaatan GPS dan SIDOLPHIN yang dimana GPS dan SIDOLPHIN tersebut merupakan anggaran PNPM Mandiri-KP demi pengembangan skill serta peningkatan bagi produksi serta keselamatan nelayan yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan pelatihan ini masih berjalan hingga sekarang dan merupakan kegiatan rutin Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.

Dapat disimpulkan bahwa pelatihan pemanfaatan GPS dan SIDOLPHIN bagi nelayan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan nelayan sehingga tidak gaptek, selain itu dengan GPS dan SIDOLPHIN dapat meningkatkan hasil tangkap nelayan. Dengan pemanfaatan informasi dari GPS dan SIDOLPHIN nelayan sudah memiliki koordinat pasti sehingga menghemat modal untuk bahan bakar selain itu dapat memberi keselamatan bagi nelayan. Olehkarena itu dapat dinyatakan bahwa kegiatan ini sudah optimal karena masyarakat nelayan tradisional langsung merasakan dampak positifnya.

3.2. Bina Usaha

3.2.1 Pemodal

Modal adalah salah satu faktor produksi yang mana digunakan nelayan dalam meningkatkan dalam

proses produksi hasil tangkapan nelayan. Berdasarkan data yang diambil penulis di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah rekapitulasi hasil fasilitas dan pendampingan permodalan bagi usaha penangkapan ikan dalam tabel berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Fasilitas Dan Pendampingan Permodalan Bagi Usaha Penangkapan ikan Tahun 2021

No	Nama Debitur	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pengajuan Kredit	Nama Bank
1	Muis	Kelurahan Arung Dalam	Nelayan	Rp.25.000.000	SUMSELBABEL
2	Hamdan	Kelurahan Arung Dalam	Nelayan	Rp.15.000.000	SUMSELBABEL
3	Abdul Wahid	Kelurahan Arung Dalam	Nelayan	Rp.15.000.000	SUMSELBABEL
4	Riyandi	Desa Penyak	Nelayan	Rp.32.000.000,	SUMSELBABEL
5	Wandi	Desa Berok	Nelayan	Rp.15.000.000	SUMSELBABEL

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

Dalam Pelaksanaanya Dinas Perikanan memfasilitasi permodalan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) masyarakat nelayan Tahun 2016 untuk tahun berikutnya Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tidak memfasilitasi lagi dikarenakan revisi anggaran dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan melalui PNPM Mandiri-KP untuk modal bagi masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, jadi Permen tersebut belum berjalan untuk sekarang.

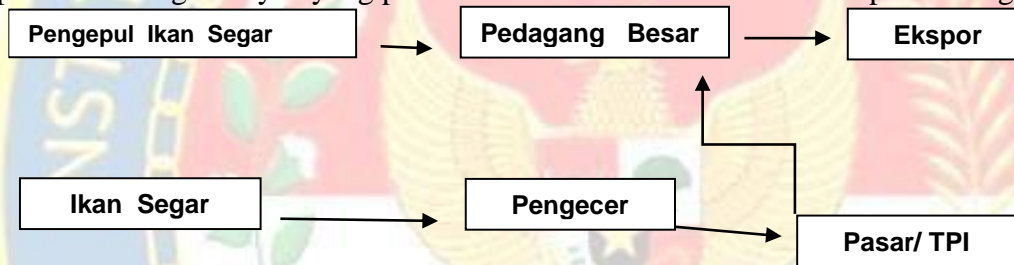
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengamati peningkatan permodalan bagi nelayan yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka menjadi perantara bagi nelayan untuk meminjam modal ke bank yang mana modal tersebut merupakan anggaran pemerintah daerah untuk modal bagi nelayan demi pengembangan serta peningkatan bagi produksi serta perawatan nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Koba. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah pernah memberi modal langsung berupa Bantuan Langsung Masyarakat yang merupakan salah satu dari PNPM Mandiri KP, Tetapi Kegiatan peningkatan permodalan ini terakhir dilaksanakan pada Tahun 2015, untuk Tahun 2016. Dalam mengatasinya pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka mensosialisasikan ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana untuk menjamin pemodalannya tersebut lancar, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah melobby Badan Pertanahan Nasional untuk memprioritaskan nelayan sebagai penerima sertifikat tanah melalui program nasional yang ada di BPN.

Dapat disimpulkan bahwa modal yang digunakan oleh nelayan menggunakan dana dari Kredit Usaha Rakyat untuk saat ini, untuk 5 tahun yang lalu nelayan mendapatkan pemodalannya langsung berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dinas Perikanan Kabupaten Bangka melalui bank akan tetapi dana tersebut telah dihentikan akan tetapi Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan mencari cara berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana untuk menjamin pemodalannya tersebut lancar, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah melobby Badan Pertanahan Nasional untuk memprioritaskan

nelayan sebagai penerima sertifikat tanah melalui program nasional yang ada di BPN untuk dana bagi nelayan tanpa meminjam modal ke tengkulak dikarenakan bunga yang besar yang mengakibatkan kerugian bagi nelayan. Demi meningkatkan biaya produksi serta biaya perawat bagi nelayan, Dapat dinyatakan bahwa kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ini belum optimal karena modalnya sendiri sudah dihentikan tetapi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka mencari pengganti yakni dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan untuk modal nelayan dalam memproduksi tangkap ikan

3.2.2 Peningkatan Pemasaran

Pasar sangat menentukan eksistensi suatu usaha. Tanpa adanya konsumen, maka produsen tidak mungkin berjalan. Potensi pasar harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk menentukan besaran usaha. Dengan kata lain, potensi pasar merupakan peluang usaha, sehingga peluang usaha dapat dikembangkan dengan pengembangan potensi pasar melalui upaya pemasaran. Berikut gambar alur pemasaran bagi nelayan yang penulis teliti di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, yakni:



Gambar 2 Distribusi jalur Pemasaran Ikan Segar

Konsep ini paling banyak di jumpai di Bangka Tengah. Ikan dari nelayan langsung di tampung oleh pengepul kemudian disalurkan ke pedagang besar untuk diekspor. Namun karena harga beli dibawah harga pasar, sehingga sebagian pengepul tetap menjual ikan kepada pengecer pasar untuk dijual langsung di pasar. Jika tidak habis, agar tidak rugi pengecer biasanya mensortir ikan yang masih bagus kemudian menjual lagi ikan tersebut ke pedagang besar untuk kemudian di ekspor meskipun dengan harga yang lebih murah. Jika tidak dapat diterima (sisa sortiran) Karena kualitasnya sudah rendah, ikan tersebut dijadikan olahan perikanan seperti empek-empek, tekwan, kerupuk, getas, dan lain-lain

Tabel 3

Data Jumlah Hasil Tangkapan Kecamatan Koba Yang Didistribusikan Berdasarkan Tujuan Pemasaran Tahun 2018

No	Kelurahan	Hasil Tangkapan Ikan		Tujuan Pemasaran (Ton)	
		Di Laut	PUD	(Lokal)	(Ekspor)
1	Koba	10.848,50	6,88	2.980	-
2	Arung Dalam	540,47	0,35	118	-
3	Berok	531,47	13,18	150	--
4	Guntung	519,74	8,91	194	-
5	Kurau Timur	1,29	0,01	9	-

No	Kelurahan	Hasil Tangkapan Ikan		Tujuan Pemasaran (Ton)	
		Di Laut	PUD	(Lokal)	(Ekspor)
6	Kurau Barat	652,22	0,48	141	--
7	Nibung	378,91	8,50	134	-
8	Padang Mulya	35,01	0,29	67	-
9	Simpang Perlang	71,84	0,05	4	-
10	Penyak	73,24	24,09	27	-
11	Terentang	75,74	24,66	26	-
JUMLAH		13.775,79	87,74	3.991	-

Sumber Data : Hasil Sensus Perikanan Tangkapan Tahun 2018

Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel diatas, maka dapat dideskripsikan untuk penidistribusian hasil tangkapan ikan di Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah jumlah paling banyak hasil tangkapan ikan adapun pemasaran yang dilakukan hanya didalam daerah (local) yaitu di Tempat Pelelangan Ikan, Pengumpul/tengkulak, dan ada pula didistribusikan langsung di pasar tradisional. Peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sendiri untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan faktor pemasaran dalam hal fasilitas maupun sarana prasarana demi mempermudah masyarakat nelayan menjual hasil tangkapannya. Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memfasilitasi Nelayan untuk menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan, pasar Koba maupun di jual keluar Provinsi dan ekspor luar negeri. Namun pada Tahun 2015 Tempat Pelelangan Ikan di Koba ditutup karena kendala retribusi pajak, tetapi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah mensiasati fasilitas pemasaran bagi nelayan ke pasar tradisional Koba, ke Tempat Pelelangan Provinsi, luar Provinsi maupun ekspor luar negeri untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah terkhususnya nelayan yang ada di Kecamatan Koba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam peningkatan pemasaran bagi nelayan di Kecamatan Koba, pada tahun 2015 Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Koba mengalami kendala yakni retribusi pajak tetapi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memfasilitasi pemasaran bagi nelayan ke pasar tradisional Koba, Tempat Pelelangan Ikan Provinsi maupun Pedangan besar untuk di jual keluar kota atau ekspor keluar negeri. Serta dalam segi Harga dan Promosi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memberikan informasi kepada masyarakat, dimana dari harga sendiri yang terjangkau bagi masyarakat menengah kebawah, adapun bulan tertentu harga ikan naik yakni Pergantian Tahun Baru serta Hari Raya Idul Fitri. Dalam pemasaran sendiri dapat meningkatkan pemasaran bagi nelayan Kabupaten Bangka Tengah terkhususnya di Kecamatan Koba. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan peningkatan pemasaran bagi nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sudah berjalan dengan peraturan maupun teori yang penulis terapkan dalam penelitian ini.

3.2.3 Peningkatan Produksi

Produksi ialah menciptakan, menghasilkan dan membuat, kegiatan produksi tidak dapat dilakukan kalau tidak ada bahan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, nelayan memerlukan tenaga yang lebih, sumber-sumber alam, modal, alat yang canggih, serta ketangkasan atau skill dari nelayan itu. Pada saat pelaksanaan penelitian di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan data bantuan sebagai berikut :

Tabel 4

KUB Penerima Bantuan Tahun 2016-2021

I. KUB Penerima Bantuan Alat Tangkap Gillnet Milenium, Kapal Dan Motor Tempel

NO	NAMA KUB	ALAMAT	TAHUN	BANTUAN
1	Kub Ombak Laut	Desa Penyak Kec.Koba	2016	2
2	Kub Tunker	Kel.Arung Dalam Kec.Koba	2017	3
3	Kub Arung Samudra I	Kel.Arung Dalam Kec.Koba	2017	2
4	Kub Sicam	Desa Kurau Kec.Koba	2017	3
5	Kub Hiu	Desa Kurau Kec.Koba	2017	2
6	Kub Arung Samudra Ii	Kel.Arung Dalam Kec.Koba	2018	2
7	Kub Samudra Jaya	Kel.Koba Kec.Koba	2018	1
8	Kub Nelayan Maju	Kel.Koba Kec.Koba	2018	1
9	Kub Air Batu	Kel.Padang Mulia Kec.Koba	2019	4
10	Kub Bintang Timur	Kel.Koba Kec.Koba	2019	3
11	Kub Karang Jahe	Kel. Padang Mulya Kec.Koba	2019	5
12	Kub Tunker	Kel. Arung Dalam, Kec. Koba	2020	1
13	Kub Armada Karang	Desa Guntung, Kec. Koba	2020	1
14	Kub Nelayan Berdikari	Desa Terentang Iii, Kec. Koba	2020	1
15	Kub Gusung Barat	Kel. Padang Mulia, Kec. Koba	2021	2
JUMLAH TOTAL				33 Unit

II. KUB Penerima Bantuan Peralatan Bagan

NO	NAMA KUB	ALAMAT	TAHUN	BANTUAN
1	Kub Bintang Timur	Kel.Koba Kec.Koba	2017	4
2	Kub Mina Adi Sejahtera	Desa Kurau Barat Kec.Koba	2017	2
JUMLAH TOTAL				6 Unit

III. KUB Penerima Bantuan Jaring Ikan Milenium 5 Inch

NO	NAMA KUB	ALAMAT	TAHUN	BANTUAN
1	Kub Ombak Laut	Desa Penyak Kec.Koba	2016	20
2	Kub Air Batu	Kel.Padang Mulya Kec.Koba	2019	4
3	Kub Bintang Timur	Kel.Koba Kec.Koba	2019	3
4	Kub Karang Jahe	Kel. Padang Mulya Kec.Koba	2019	5
JUMLAH TOTAL				32 Unit

IV. KUB Penerima Bantuan Jaring Udang

NO	NAMA KUB	ALAMAT	TAHUN	BANTUAN
1	Kub Kusuma Bahari	Desa Kurau Timur Kec. Koba	2016	56
2	Kub Kepiting Laut	Desa Kurau Timur Kec. Koba	2016	79
3	Kub Citra Lestari	Desa Kurau Timur Kec. Koba	2016	95
4	Kub Kuda Laut	Desa Kurau Timur Kec. Koba	2016	95
5	Kub Nelayan Bersatu Guntung	Desa Terentang Kec Koba	2018	2
6	Kub Sinar Laut	Desa Penyak Kec Koba	2018	1
7	Kub Pesisir Laut	Desa Terentang Iii, Kec. Koba	2020	1
8	Kub Mulia Lestari	Desa Penyak, Kec. Koba	2020	1
9	Kub Armada Karang	Desa Guntung, Kec. Koba	2020	1
10	Kub Pari Halai	Desa Kurau Barat, Kec. Koba	2020	1
JUMLAH TOTAL				332 Unit

V. KUB Penerima Bantuan Jaring Monofilamen

NO	NAMA KUB	ALAMAT	TAHUN	BANTUAN
1	Kub Jembatan Berok	Kel. Berok, Kec. Koba	2020	1
2	Kub Tanjung Mas	Desa Penyak, Kec. Koba	2020	1
3	Kub Putra Laut	Desa Penyak, Kec. Koba	2020	1
4	Kub Harapan Makmur	Desa Penyak, Kec. Koba	2020	1
5	Kub Mulia Sejahtera	Desa Penyak, Kec. Koba	2020	1
6	Kub Ombak Laut	Desa Penyak, Kec. Koba	2020	1
JUMLAH TOTAL				6 Unit

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perikanan dalam Produksi bagi nelayan yang mana pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perikanan, nelayan maupun petani ikan secara merata. Dalam ayat 1 yang meliputi pembinaan iklim usaha, saran, keterampilan produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan. Hal ini dapat dilihat dari data penerima bantuan pada tahun 2016 - 2021.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengamati peningkatan produksi bagi nelayan yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka memberikan bantuan serta sosialisasi tentang penggunaan teknologi alat-alat tangkap yang canggih kepada nelayan supaya meningkatkan hasil produksi dari nelayan tersebut. Dalam hal ini dari Tahun 2016 - 2019 peningkatan terus terjadi kepada Nelayan di Kecamatan Koba dapat dilihat dari gambar Rekapitulasi Produksi Tangkapan Di Perairan Laut dan Kabupaten Bangka Tengah,

Tabel 5

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya, Rumah Tangga Perikanan Laut Dan Data Produksi Perikanan Tangkap Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2019

NO	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut	Data Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
1	2016	214	4.167	19.672,60
2	2017	220	4289	23.606,50
3	2018	283	3824	23.969,70
4	2019	291	1784	25.068,90

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah 2022

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan demi meningkatkan hasil produksi mereka, seperti memberikan sosialisasi membantu hasil produksi tangkapan nelayan, kapan waktu yang tepat untuk melaut, alat-alat tangkap yang canggih untuk menangkap ikan dengan tepat. Dari kegiatan peningkatan produksi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan sudah berjalan dengan peraturan dan teori yang penulis terapkan dalam penelitian ini.

3.3. Bina Lingkungan

3.3.1 Lingkungan Fisik

Ekosistem laut merupakan bagian terpenting bagi nelayan, karena lautan menyediakan sumber penghasilan nelayan, Kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan, maupun ada nelayan yang nakal dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom, bus dan pukat berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem laut, terutama pada terumbu karang. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom menyebabkan karang hancur, ikan- ikan kecil mati, bahkan kelangsungan jiwa dari pelaku juga dapat terancam bahkan sampai mati. Selain itu, kegiatan penggunaan bom juga dapat menyebabkan kegiatan budidaya ikan dalam keramba terganggu dan penggunaan obat bus dapat merusak pertumbuhan budidaya rumput laut berubah menjadi putih dan mati. Kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 6

Jumlah Data Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2019

NO	Tahun	Data Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
1	2014	17.647,20
2	2015	18.325,10
3	2016	19.672,60
4	2017	23.606,50
5	2018	23.969,70
6	2019	25.068,90

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel diatas, maka dapat dideskripsikan untuk hasil tangkapan ikan pada tahun 2014 hingga 2019 di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan hingga sebesar

126,63 persen. Hasil pencapaian tersebut adalah dari produksi perikanan tangkap, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan.

Peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sendiri untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut yaitu dengan melaksanakan sosialisasi bagaimana pentingnya terumbu karang bagi nelayan, kemudian untuk pembangunan lingkungan fisiknya, Dinas Kelautan Kabupaten Bangka Tengah melakukan reboisasi karang dan membuat ekosistem baru seperti karang buatan yang disebut dengan rumpun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam lingkungan fisik bagi nelayan di Kecamatan Koba, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah kesulitan dalam mengatasi penangkapan ikan yang berlebihan dan mengawasi nelayan yang nakal dengan menggunakan alat terlarang untuk menjaga lingkungan fisik. Namun untuk mengatasi hal tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah melakukan pelestarian lingkungan fisik berupa reboisasi karang dan pembangunan rumpun laut sehingga habitat makhluk laut tetap terjaga. Nelayan juga sebagian besar memahami bagaimana pentingnya ekosistem laut, dan ikut serta menjaga lingkungan fisik. Namun tetap saja ada beberapa nelayan yang nakal dengan penggunaan alat tangkap terlarang, hal itu biasanya terjadi karena masalah ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelestarian lingkungan fisik di laut Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah bagi nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sudah berjalan dengan peraturan maupun teori yang penulis terapkan dalam penelitian ini.

3.4. Bina Lembaga

3.4.1 Penguatan Kelembagaan/Partisipasi Masyarakat

Kelembagaan yang baik dan mapan dapat menciptakan nelayan yang tangguh, mandiri dan berdaya saing, Kabupaten Bangka Tengah menggenjot pembentukan kelembagaan nelayan lewat Kelompok Usaha Bersama. Dengan kelompok usaha bersama dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan oleh individu nelayan yang sudah di bahas pada 3.1.1 Analisis Peningkatan Pengetahuan. Tabel Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Koba dapat dilihat pada Tabel 1

Selain fasilitasi bantuan pendanaan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan penguatan terhadap peran kelembagaan nelayan, fasilitas kemitraan usaha untuk memasarkan hasil tangkapan serta pemberian asuransi nelayan gratis. Daftar penerima asuransi dapat dilihat pada tabel nelayan penerima asuransi gratis:

Tabel 7

Nelayan Penerima Asuransi Gratis Di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah

No	Nama	No KN	Tahun	Alamat
1	Asnawi	A1B1C19.04.2013.000526	2018	Desa Arung Dalam
2	Muhai Roni	A1B1C19.04.2016.001775	2018	Desa Arung Dalam
3	Jemaun	A1B1C19.04.2018.002370	2018	Desa Penyak
4	Anwar Khasani	A2B1C19.04.2016.001673	2018	Desa Kurau Timur
5	Herry Jamaludin	A4B1C19.04.2016.001842	2018	Desa Arung Dalam
6	Syaipul Bahri	A1B1C19.04.2015.000971	2018	Desa Arung Dalam
7	Hasan Basri	A1B1C19.04.2015.000946	2018	Desa Arung Dalam
8	Ainan	A1B1C19.04.2013.000750	2018	Desa Arung Dalam
9	Ramdani	A1B1C19.04.2016.001464	2018	Desa Padang Mulia
10	Syahrul Fajri	A1B1C19.04.2016.001282	2018	Desa Simpang Perlang

No	Nama	No KN	Tahun	Alamat
11	Abdur Rahman	A3B1C19.04.2015.000982	2018	Desa Padang Mulia
12	Tuhir	A3B1C19.04.2015.000979	2018	Desa Padang Mulia
13	Asrullah	A1B1C19.04.2014.000807	2018	Desa Padang Mulia
14	Sukardy	A4B1C19.04.2014.000811	2018	Kelurahan Koba
15	Hariul Saka	A1B1C19.04.2015.000972	2018	Kelurahan Koba
16	Rustam	A1B1C19.04.2015.000973	2018	Kelurahan Koba
17	Khairi	A1B1C19.04.2014.000801	2018	Desa Arung Dalam
18	Amrullah	A1B1C19.04.2013.000782	2018	Kelurahan Koba
19	Basri	A1B1C19.04.2015.000976	2018	Desa Arung Dalam
20	Darmadi	A1B1C19.04.2013.000767	2018	Desa Arung Dalam
21	Ahmat Yusuf	A1B1C19.04.2013.000776	2018	Kelurahan Koba
22	Budiman	A1B1C19.04.2013.000748	2018	Desa Arung Dalam
23	Tamni	A1B1C19.04.2013.000744	2018	Desa Arung Dalam
24	Budi	A1B1C19.04.2013.000781	2018	Desa Arung Dalam
25	Syahrhan Firdaus	A1B1C19.04.2013.000747	2018	Desa Arung Dalam
26	Muhammad Rozali	A1B1C19.04.2017.007906	2018	Desa Simpang Perlang
27	Ruslan	A1B1C19.04.2013.000745	2018	Desa Arung Dalam
28	Muis	A1B1C19.04.2013.000742	2018	Desa Arung Dalam
29	Hendri Donant	A1B1C19.04.2014.000802	2018	Desa Arung Dalam
30	Deni Purnomo Purba	A2B1C19.04.2017.002313	2018	Desa Arung Dalam
31	Achmad Taro	A2B1C19.04.2013.000525	2018	Desa Berok
32	Edy Heryanto	A2B1C19.04.2013.000529	2018	Desa Berok
33	Abdul Wahid	A1B1C19.04.2015.000970	2018	Desa Arung Dalam
34	Rusli	A1B1C19.04.2014.000809	2018	Kelurahan Koba

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 46 Tahun 2018 pasal 21 huruf (h) menjelaskan bahwa pengembangan dan pemfasilitasian terbentuknya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan Pasal 15 huruf (d) yang menjelaskan bahwa pemfasilitasian jaminan keselamatan, jaminan usaha dan bantuan hukum bagi nelayan kecil. Penerapan pasal tersebut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah melakukan pembentukan, pembinaan dan pengawasan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan pemberian asuransi gratis kepada nelayan untuk jaminan kesehatan dan keselamatan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari data penerima asuransi pada tabel 4.13.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengamati penguatan kelembagaan bagi nelayan tradisional melalui PNP Mandiri Kelautan Dan Perikanan di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah mengarahkan dan merekomendasikan nelayan kecil untuk tergabung di dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), ketika nelayan telah tergabung di dalam KUB maka nelayan akan lebih mudah mendapatkan berbagai sosialisasi dan fasilitas, baik dalam alat bantu tangkap maupun asuransi kesehatan bagi nelayan. Dalam hal ini kelembagaan nelayan bisa menguat dan mempermudah nelayan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sehingga nelayan lebih tertarik bergabung di dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) demi meningkatkan penguatan kelembagaan mereka, seperti memberikan sosialisasi pentingnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan keuntungan apa yang bisa didapatkan jika

tergabung didalam KUB. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah menjamin kesehatan dan keselamatan nelayan dengan memberi asuransi gratis. Dari kegiatan penguatan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sudah berjalan sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan, peraturan bupati dan teori yang penulis terapkan dalam penelitian ini.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) sebagai salah satu program pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Temuan penting yang ditemukan penulis dimana adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi nelayan sehingga dilaksanakan PNPM Mandiri KP yang difokuskan kepada masyarakat nelayan tradisional.

Keterbatasan kemampuan dan juga sarana prasarana sangat berpengaruh dalam memperoleh hasil mata pencaharian termasuk masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan. PNPM Mandiri KP merupakan salah satu program pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan untuk membantu nelayan agar dapat lebih berkembang. Dengan dilaksanakannya PNPM Mandiri KP akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nelayan. Hal ini didasarkan dengan adanya bantuan yang diberikan berupa perahu tangkap, *chestfreezer*, alat pancing, GPS dan juga SIDOLPHIN. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada dampak dari pelaksanaan PNPM Mandiri KP terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pada dasarnya pelaksanaan PNPM Mandiri KP telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan perencanaan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya penulis menemukan kendala, dimana masih kurangnya kualitas SDM itu sendiri, terhentinya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dan juga kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP dalam bina lingkungan. Kendala-kendala tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan program pemberdayaan yang diberikan dan juga kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat keberhasilan dalam PNPM Mandiri KP yang dilaksanakan di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung yakni masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya program pemberdayaan yang diberikan, pengawasan dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan PNPM Mandiri KP dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Pemberdayaan Nelayan Tradisional Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan di Kecamatan Koba oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah yaitu :

1. Pelaksanaan Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan demi meningkatkan pengetahuan dalam mengelola keuangan dinilai cukup baik, namun ada kendala dalam SDM itu sendiri, oleh karena itu Dinas Perikanan memberikan sosialisasi membantu hasil produksi tangkapan nelayan, kapan waktu yang tepat untuk melaut, alat-alat tangkap yang canggih untuk menangkap ikan dengan tepat. Dari kegiatan peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan sudah berjalan dengan peraturan dan teori yang penulis terapkan dalam penelitian ini. Kemudian dalam pelaksanaan Pelatihan dinilai sangat baik karena pemanfaatan GPS dan SIDOLPHIN bagi nelayan merupakan kegiatan yang meningkatkan keterampilan nelayan sehingga tidak gaptek, selain itu dengan GPS dan SIDOLPHIN dapat meningkatkan hasil tangkap nelayan dan menghemat modal dalam melaut.

Dalam pelaksanaan pemodalannya dinilai kurang baik karena Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ini belum optimal karena pada tahun 2016 anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tidak difasilitasi lagi dikarenakan revisi anggaran dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan tetapi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah mencari pengganti yakni dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan untuk modal nelayan dalam memproduksi tangkap ikan.

Kemudian pemberdayaan nelayan dalam mengatasi pemasaran dinilai cukup baik, hal ini dilaksanakan dengan cara meneruskan hasil tangkapan ikan ke pasar tradisional Koba, Tempat Pelelangan Ikan Provinsi maupun Pedangan besar untuk di jual keluar kota atau ekspor keluar negeri. Serta dalam segi. Harga dan Promosi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memberikan informasi kepada masyarakat, dimana dari harga sendiri yang terjangkau bagi masyarakat menengah kebawah.

Dalam pelaksanaan kegiatan mengatasi Peningkatan Produksi bagi nelayan oleh Dinas Kabupaten Bangka Tengah dinilai sangat baik, upaya tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan seperti kapal, mesin, alat tangkap dan sosialisasi bagi nelayan penggunaan alat-alat tangkapan yang lebih canggih untuk melaut sehingga meningkatkan hasil produksi hasil tangkapan nelayan yang lebih banyak dan berkualitas.

Dalam kegiatan pelestarian lingkungan fisik di laut Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dinilai kurang baik karena kurangnya pengawasan dalam penggunaan alat tangkap terlarang, namun Dinas Kabupaten Bangka Tengah telah membuat kebijakan tertentu dalam mengatasi hal tersebut walaupun pelaksanaannya masih kurang baik.

Dalam pelaksanaan Penguatan Kelembagaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dinilai sangat baik, upaya tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sehingga nelayan lebih tertarik bergabung di dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) demi meningkatkan penguatan kelembagaan mereka, seperti memberikan sosialisasi pentingnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan keuntungan apa yang bisa didapatkan jika tergabung didalam KUB. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah menjamin kesehatan dan keselamatan nelayan dengan memberi asuransi gratis. Dari kegiatan penguatan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sudah berjalan sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan, peraturan bupati dan teori yang penulis terapkan dalam penelitian ini

2. Dengan memberikan sosialisasi membantu hasil produksi tangkapan nelayan, kapan waktu yang tepat untuk melaut, alat-alat tangkap yang canggih untuk menangkap ikan dengan tepat. Kemudian Pelatihan pemanfaatan GPS dan SIDOLPHIN bagi nelayan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan nelayan sehingga tidak gaptek, selain itu dengan GPS dan SIDOLPHIN dapat meningkatkan hasil tangkap nelayan dan menghemat modal. Kemudian dalam pemodalan, nelayan tradisional mendapatkan bantuan khusus berupa sertifikat tanah dari program BPN yang dimana Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tengah melobby Badan Pertanahan Nasional untuk memprioritaskan nelayan sebagai penerima program, sehingga sertifikat tanah tersebut bisa menjadi penjamin dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dampaknya nelayan terlepas dari ketergantungan akan pinjaman tengkulak.

Dalam peningkatan produksi nelayan sangat terbantu karena menerima bantuan seperti kapal, mesin, alat tangkap dan sosialisasi bagi nelayan penggunaan alat-alat tangkapan yang lebih canggih.

Dalam Pelaksanaan kelembagaan melalui PNPM Mandiri KP dinilai efektif karena masyarakat wajib tergabung kedalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk menerima manfaat program. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah menjamin kesehatan dan keselamatan nelayan dengan memberi asuransi gratis.

Keterbatasan Penelitian: Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, terdapat kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Peneliti merasa hal itu memang pantas terjadi sebagai pembelajaran peneliti dan penelitian yang selanjutnya. Dalam hal ini peneliti memaparkan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan yang terjadi. Pertama adalah kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya penelitian dan hasil dari penelitian itu sendiri. Peneliti sadar akan hal ini karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan lain yang menyita waktu dan pikiran. Menurut peneliti, eksplorasi teori penting untuk menambah khasanah ilmu komunikasi di Indonesia, khususnya dalam mempelajari media. Kedua adalah kendala teknis di lapangan yang secara tidak langsung membuat peneliti merasa penelitian ini kurang maksimal. Ketika memutuskan untuk memakai metode penelitian kualitatif, peneliti sadar akan banyaknya interaksi yang harus dibangun dengan subyek dan obyek penelitian. Maka banyak waktu yang terbuang untuk menjalin interaksi ini sehingga waktu yang semakin mendekati deadline tersebut dirasa kurang untuk membuat penelitian ini lebih baik.

Arah Masa Depan: Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat nelayan tradisional di kecamatan Koba kedepannya akan semakin kondusif dinilai dari optimalnya pemberdayaan berdasarkan beberapa indikator penelitian seperti peningkatan pengetahuan, pelatihan, peningkatan pemodalan, peningkatan pemasaran, peningkatan hasil produksi, kelestarian lingkungan dan penguatan kelembagaan. Semua indikator keberhasilan pemberdayaan terhubung antara satu sama lain dimana penguatan kelembagaan menjadi syarat utama untuk indikator-indikator penelitian lainnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, Bapak nelayan yang telah sabar menerima peneliti dalam penelitian serta seluruh pihak yang membantu pada saat pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mardikanto dan Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- KKP. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Kelautan Perikanan 2010-2014*, Jakarta: Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- BPS Kab. Bangka Tengah. 2020. *Bangka Tengah Dalam Angka 2020*, Koba: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah.
- Bappenas. 2013. *Evaluasi PNPM Mandiri*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
- Imron, M. 2003 “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan ” dalam Jurnal masyarakat dan budaya. PMB–LIPI. Jalaluddin. 2002. *Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E Savitri. 2016. Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir. *Buku Pemberdayaan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Sahila Yogyakarta,
- IGAY Iswari. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Di Dusun Pangkung Dedari Desa Melaya Kecamatan Melaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Volume 11 No.2 Tahun 2019.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Perikanan.